

Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Sekecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara

Semuel Mawa' Ratu
Universitas Kristen Indonesia Toraja
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811 Kab. Tana Toraja
wastimawaratu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Sebagai bantuan pertimbangan utama dari program BOS adalah Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah NO. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Penelitian diarahkan pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah – Sekolah di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara yang telah mendapat Bantuan BOS sebagai dasar Evaluasi bahwa apakah ada pengaruh positif dari proses pengelolaan BOS terhadap pembangunan fisik sekolah dan kesejahteraan guru pada SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat secara dekat proses terhadap penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP untuk mensukseskan Program Pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan mengurangi beban orang tua siswa terhadap biaya pendidikan, serta merumuskan angka putus sekolah di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini adalah suatu penelitian Evaluasi dengan penyebaran Populasi pada lima Sekolah SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui gambaran Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, dari tahun 2007 sampai sekarang. (2) Untuk mengetahui dampak Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap proses pembelajaran pada SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, dari tahun 2007 sampai sekarang, (3) untuk mengetahui dampak Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pembangunan Fisik Sekolah SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2007 sampai sekarang, (4) Untuk mengetahui dampak Dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap pelayanan guru SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2007 sampai sekarang.

Kata kunci: Pengelolaan, Dana BOS, SMP sekecamatan Sa'dan, Toraja Utara,

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, selanjutnya dalam pasal 34 ayat 3 ini menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat besar karena lebih dari 90 persen sekolah menengah pertama (SMP) berstatus sebagai milik pemerintah. Sementara itu tekad untuk memperbaiki pelayanan pendidikan dasar masih dihadapkan pada persoalan belum meratanya kesempatan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan, dibarengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi dana minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan daerah (APBN dan APBD) (Depdiknas, 2004). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan juli 2005 telah berperan besar dalam percepatan

pencapaian program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun tersebut.

Oleh karena itu mulai dari tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program-program BOS bukan hanya berpusat untuk mempertahankan APK, namun juga harus berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Kenaikan biaya BOS yang disignitifikasikan ini telah menjadi pilar utama dalam mewujudkan pendidikan gratis di Pendidikan dasar. Peningkatan biaya satuan BOS pada tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20 % anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh pendekatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program pendanaan. Dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 semakin jelas jenis – jenis dana pendidikan serta peranan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lanjut dari program jaringan pengaman sosial (JPS) bidang pendidikan yang dilaksanakan pemerintah dalam kurun waktu 2003 – 2005. BOS diusahakan sebagai biaya subsidi Bantuan Operasional Sekolah kepada semua peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26. 866. 992 siswa sekolah dasar yang disalurkan melalui satuan pendidikan.

Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten pemekaran dari Tana Toraja yang dikenal sebagai kabupaten pendidikan dengan mengutamakan misi pembangunan di bidang pendidikan. Upaya pembinaan pendidikan masih dihadapkan pada beberapa persoalan, antara lain masih banyak jumlah penduduk yang belum berpartisipasi dalam pendidikan mulai dari TK sampai tingkat SMA dan masih tingginya disparitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Upaya-upaya untuk menekan angka putus

sekolah yaitu melalui program BOS, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan layanan alternatif bagi siswa yang rentan dan yang telah putus sekolah perlu terus di lanjutkan. Selain itu dengan tuntasnya reabilitas SD dan SMP yang telah diintervensi melalui beberapa program terutama pogram Dana Alokasi Khusus (DAK), maka fokus pembangunan pendidikan sekolah dan berbagai bentuk program bantuan seperti ; Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pembinaan pendidikan sekolah melalui APBN, mulai tahun 2010 diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Dengan program BOS, Satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik terutama mereka yang miskin. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan ke semua satuan pendidikan yang menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun baik negeri maupun swasta serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Dengan melihat uraian tersebut diatas peneliti ingin melihat secara mendalam sampai sejauh mana pengelolaan dana BOS pada SMP Sekecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Itulah sebabnya peneliti memilih satu judul “Pengelolaan Dana BOS pada SMP Sekecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara”.

Dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah masih mengalami berbagai macam kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih adanya alokasi dana bantuan operasional sekolah yang belum terserap secara keseluruhan sehingga dana tersebut dikembalikan ke kas Negara sebagai akibat ketidak mampuan pengelola BOS pada tingkat satuan pendidikan untuk mengelolanya secara professional.
2. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah masih mengalami keterlambatan.

3. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah masih banyak yang tidak tepat sasaran.
4. Belum tertibnya administrasi keuangan sebagaimana tuntutan petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Dana BOS.
5. Belum tertibnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
6. Pelaporan penggunaan anggaran selalu terlambat.
7. Pencairan dana BOS dari Pusat ke Daerah masih sering terlambat.

Dari berbagai permasalahan diatas penulis dalam penulisan tesis ini membatasi permasalahan yaitu terbatasnya kemampuan pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada setiap satuan menyebabkan adanya anggaran yang pendidikan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan kerugian Negara. Sehingga menghambat proses penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2005 sampai sekarang?
2. Bagaimana dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap proses pembelajaran pada SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2008 sampai sekarang?
3. Bagaimana dampak Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap perkembangan sekolah terhadap SMP di Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Totaja Utara dari tahun 2008 sampai sekarang?
4. Bagaimana dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pelayanan guru SMP di Kecamatan Sa'dan, kabupaten Toraja Utara dari tahun 2008 sampai sekarang?

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara dalam memanfaatkan secara efektif dan efisien pengelolaan dana BOS.
2. Sebagai informasi bagi pihak Pemda Kabupaten Toraja Utara dalam mengambil kebijakan terhadap pendanaan pendidikan.
3. Masukan bagi Kepala SMP beserta Dewan Guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui dana bantuan operasional sekolah secara efektif dan efisien.
4. Sebagai bahan dasar (acuan) bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut variabel – variable lain dalam penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan penelitian ini diahlikan agar bertujuan untuk melihat sejauh mana program bantuan operasional sekolah (BOS) dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu agar sekelolah dengan sebaik – baiknya oleh setiap pemangku kepentingan.

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian ini dilaksanakan pada semua sekolah menengah pertama (SMP) kecamatan Sa'dan kabupaten Toraja Utara.
2. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini waktu 3 (tiga) bulan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive Sampling.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yang sekaligus bertindak sebagai sampel penelitian adalah semua guru, staf tata usaha bendahara, wakil kepala sekolah di SMP Sekecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara yang berjumlah 97 orang, yang terdiri atas: 79 orang guru, 12 orang staf tata usaha dan bendahara, 5 orang wakil kepala sekolah, dan 5 orang kepala sekolah yang tersebar pada 5 buah sekolah SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Adapun pertimbangan pengambilan responden pada SMP di Kecamatan Sa'dan adalah: (1) semua SMP tersebut sudah mendapatkan dana BOS sejak tahun 2005 sampai sekarang, dan (2) diperoleh data bahwa ada beberapa SMP Negeri tersebut mempunyai prestasi belajar peserta didiknya yang belum memuaskan.

Responden penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, bendahara dan wakil kepala sekolah tersebar pada masing – masing SMP Negeri sampel penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik Purposive Sampling sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 97 org. sebaran data responden dapat dilihat pada tabel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan pengelolaan BOS, dan dampak BOS terhadap proses pembelajaran, pembangun-an fisik sekolah dan kesejahteraan guru SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara mulai tahun 2007 sampai 2011.

Urutan langkah dalam teknis analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penyuntingan data yang bertujuan untuk menyeleksi data yang kurang jelas ataupun hasil pedoman wawancara langsung terhadap responden yang belum akurat.
2. Penyusunan data variabel dalam bentuk tabulasi dan distribusi, frekuensi serta presentase.
3. Analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Dampak Peruntukan BOS Terhadap Pembangunan Fisik Sekolah Mulai Tahun 2007 sampai Tahun 2011

Sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak peruntukan BOS terhadap Pembangunan Fisik Sekolah meliputi: alat-alat laboratorium, buku perpustakaan, computer, meja dan kursi, rehabilitasi bangunan yang rusak mulai tahun 2007 sampai 2011 pada SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Hasil wawancara terhadap masing – masing kelompok responden dapat di uraikan berikut ini.

Responden kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa peruntukan BOS terhadap pembangunan Fisik sekolah sangat membantu dalam proses pembelajaran sebagai kegiatan pokok dari kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Salah satu dampak BOS yang nyata adalah pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA yang selama ini diabaikan karena pihak guru sendiri kurang berkreasi berinovasi dalam menciptakan model lain sumber pelajaran berupa melakukan percobaan pada pokok bahasan tertentu dari materi yang digunakan. Dengan adanya pembiayaan BOS tersebut, diharapkan tumbuh minat belajar siswa dan guru dan proses pembelajaran untuk tidak melakukan eksperimen.

Hasil responden bendahara tentang Dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut terhadap pembangunan Fisik sekolah bahwa jumlah yang kurang

memadai hanya dilakukan pada pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya seperti pengadaan alat dan laboratorium IPA yang sangat mendesak pada saat seorang guru ingin melakukan percobaan, sedangkan pada laboratorium bahasa hanya sebatas penambahan beberapa alat perlengkapan dalam percakapan bahasa terutama dalam bahasa Inggris. Pengadaan buku hanya dilakukan pada buku referensi dan pengayaan untuk koleksi di perpustakaan. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan. Bagian pembangunan fisik sekolah lainnya dapat disesuaikan dengan dana yang ada.

Responden wakil kepala sekolah memberikan komentar tentang dampak Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pembangunan fisik sekolah bahwa bentuk pendanaan pada pengadaan alat dan bahan laboratorium baik IPA maupun bahasa hanya dilakukan pada saat guru yang bersangkutan melakukan praktikum terkadang ada bahan Kimia, Fisika, Biologi yang tidak tersedia di laboratorium sehingga diperlukan dana untuk pembelian alat dan bahan tersebut, meskipun diakui bahwa pelaksanaan praktikum yang dilakukan oleh guru frekuensinya hanya satu kali satu bulan, berarti dalam satu periode anggaran BOS tersebut hanya empat kali.

Para guru memberikan tanggapannya tentang keberadaan BOS tersebut dalam pengadaan alat dan bahan praktikum IPA dan Bahasa sangat dibutuhkan, bahkan kalau bisa ditingkatkan besaran jumlahnya yang disesuaikan dengan naiknya harga pembiayaan yang ada sekarang. Salah satu indikator keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah adalah adanya korelasi pendekatan teoritis dengan pendekatan praktek yang ingin dibuktikan oleh daya nalar siswa melalui percobaan di laboratorium. Pengadaan sarana bacaan yang ada di perpustakaan

takaan diharapkan akan dapat menumbuhkan minat baca siswa dan guru dalam menambah wawasan pengetahuan, bisa membandingkan beberapa konsep dan teori yang berkembang dan cara berpikir kritis dalam membentuk sikap kepribadian yang mandiri sebagai dampak BOS terhadap pengadaan buku sumber informasi tersebut.

Deskripsi Dampak Peruntukan BOS Terhadap Pelayanan Guru Mulai Tahun 2007 sampai Tahun 2011

Dampak Peruntukan BOS terhadap Pelayanan Guru yang selama ini digunakan oleh pihak sekolah berorientasi pada peningkatan guru yang meliputi: Perencanaan Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran dan kemampuan mengajar mulai tahun 2007 sampai tahun 2011 pada masing-masing SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

Para Responden kepala sekolah memberikan penjelasan dan pengaruhnya terhadap pelayanan guru adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembelajaran yaitu meliputi pembiayaan untuk pengadaan alat perangkat pembelajaran guru dalam setiap melakukan proses belajar mengajar di kelas, dengan memberikan fasilitas yang berkaitan dengan proses perencanaan tersebut antara lain: semua bentuk ATK. Bila kebutuhan guru tidak tersedia di koperasi sekolah atau pihak tata usaha menyediakannya, maka pihak guru di berikan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Pelaksanaan pembelajaran meliputi pembiayaan untuk tunjangan tambahan mengajar guru yang disamakan dengan guru yang tidak tetap, atau bentuk kegiatan lainnya berupa perhitungan jumlah jam mengajar per minggu, yang disesuaikan dengan peruntukan BOS tersebut. Bentuk lain yang diberikan kepada guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah melakukan kegiatan MGMP di luar lingkungan sekolah yang memberikan biaya

transportasi atau mengikuti seminar dalam menambah wawasan keilmuan dan profesionalannya dalam mengerjakan tugas. Begitu pula melakukan kunjungan lapangan bersama siswa yang memerlukan dana tambahan yang berasal dari BOS.

3. Evaluasi Pembelajaran yang meliputi: pembiayaan dalam menyusun soal, pengadaan soal, pemeriksaan soal dan lebih khusus lagi pada wali kelas yang diberikan uang tunjangan wali kelas dengan jumlah tertentu, dalam melakukan transfer nilai kedalam buku lapor siswa yang disesuaikan dengan sumber dana yang ada
4. Kemampuan mengajar yang meliputi pembiayaan alat bantu pembelajaran yang dibuat oleh guru, yang memerlukan dana khusus, atau pembiayaan dalam peningkatan kinerja guru dalam bentuk karya tulis baik secara bersama – sama maupun secara perseorangan.

Berdasarkan tanggapan responden bendahara sekolah tentang dampak BOS terhadap guru adalah pada dasarnya sangat mendukung dengan adanya dana tersebut, sebab pembiayaan yang paling mendasar meningkatkan kinerja guru adalah peningkatan kinerja guru dari berbagai aspek termasuk didalamnya pada bidang pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi pembelajaran serta kemampuan guru dalam mengajar. Adanya peruntukan dana untuk pembiayaan guru tersebut, dapat meningkatkan tercapainya tujuan pembelajaran, karena guru merasa terbebani bilamana dalam tugasnya tidak terselesaikan dengan baik, sehingga dampaknya keberadaan BOS adalah nyata dalam meningkatkan prestasi kerja guru dalam proses pembelajaran. Disisi lain, perlunya peningkatan kesejahteraan guru sebagai bentuk pemberdayaan potensi yang dimiliki guru secara tidak langsung untuk perkembangan profesionalismenya dengan satu titik fokus perhatian guru pada proses pembelajaran semata dengan tingkat kesejahteraan yang cukup memadai, untuk

menghidupi anggota keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar guru konsentrasi mulai dari persiapan mengajar, melaksanakan proses pembelajaran sampai pada evaluasi pembelajaran secara baik dan benar, sesuai yang diharapkan oleh tujuan kurikulum.

Hasil responden dari kepala sekolah dan guru hampir semua sama dalam memberikan komentar tentang dampak BOS terhadap pelayanan guru, yang terangkum dalam beberapa hal yaitu :

1. Dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja guru dalam menunaikan tugasnya baik di kelas maupun di luar kelas.
2. Tercapainya tujuan pembelajaran tepat waktu dan sasaran yang diinginkan
3. Berkembangnya daya kreatifitas dan inovatif pada masing – masing guru dalam memanfaatkan sumber pembiayaan dari BOS sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.
4. Terciptanya suasana belajar yang mendukung antara guru dengan siswa yang dibantu dengan alat bantu pembelajaran yang mencakupi.

PEMBAHASAN

Pengelolaan BOS

Dengan melihat hasil penelitian yang telah di uraikan di atas menunjukkan bahwa besaran dana BOS yang turun pada masing – masing sekolah pada SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara sangat bervariasi sangat tergantung dari jumlah siswa yang ada, dan jika dibandingkan dengan kebutuhan di setiap sekolah masih sangat minim karena karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pengelolaan pendidikan baik yang bersifat rutin maupun pembiayaan yang dilakukan secara bertahap cukup banyak sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Pelaksanaan penerimaan BOS mulai tahun 2007 sampai tahun 2011 pada SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara terjadi penurunan pada terakhir sebagai akibat dari penertiban siswa berdasarkan

besar jumlah siswa dalam setiap kelas disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan standar minimal pendidikan juga disebabkan adanya perubahan system penerimaan pembiayaan yang selama ini hanya bersumber pada BOS saja tetapi sekarang sudah banyak pembiayaan lain yang tujuan dan peruntukannya sama dengan BOS, yang meliputi pemeliharaan sarana fisik sekolah, proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang dilakukan oleh guru bersama siswa. Terjadinya penurunan jumlah BOS juga dipengaruhi dengan adanya system pengelolaan anggaran yang diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat dalam kerangka acuan otonomi daerah terutama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara sehingga Pemerintah membagi anggaran tersebut dalam beberapa bentuk dan jenis pembiayaan pengelolaan pendidikan, termasuk di dalamnya pembangunan fisik gedung belajar dan ruang guru dll.

Posisi BOS yang langsung memadai dalam pembiayaan pendidikan tersebut di perlukan keterampilan khusus dalam mengelolanya, harus semua jenis peruntukannya, harus semua terakomodir dalam pelaksanaannya, meskipun masing – masing anggaran sedikit adanya, sehingga kepala sekolah dan bendahara sekolah bekerjasama dengan wakil kepala sekolah sarana dan prasarana harus mampu memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah masing – masing Pemerintah BOS tersebut. Di sisi lain di butuhkan sumber pembiayaan lain dalam membantu pengelolaan pembiayaan pendidikan, bukan semata – mata pembiayaan tersebut dari BOS, antara lain: sumbangan dari orang tua siswa yang mampu melalui komite sekolah, bantuan dari masyarakat lainnya seperti pengusaha dan alumni sekolah yang telah menjadi konglomerat.

Adanya beberapa tahapan penerimaan BOS tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang berwenang tentang peruntukannya, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka penerimaan kedua secara otomatis dihentikan, hal ini tertuang dalam aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat bagi sekolah penerima BOS.
 2. Bilamana tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban BOS diterima dengan berbagai persyaratannya, maka tahap kedua bisa dicairkan kembali dengan rentang waktu empat bulan ke depan.
 3. Adanya betuk laporan yang sistematis karena beban pertanggung jawabannya hanya empat bulan sekali, jika dibandingkan dengan beban pertanggung jawaban setahun anggaran
- Sejalan dengan petunjuk buku panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan dalam beberapa ketentuan dalam penerimaan dan pengelolaan BOS antara lain :

1. Tim Manjer BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
2. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang di tunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah
3. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah (Bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh ketua komite sekolah, dan dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku, sebab minimum ini bukan termasuk pemotongan, pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi / persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana

dan jalannya kegiatan operasional sekolah

4. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dan tidak perkenankan adanya potongan dan pemungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
5. Penyaluran dana BOS secara bertahan (tiga bulan) bukan berarti dana harus disebabkan dalam periode tersebut. Besar pengeluaran dana tiap bulan disesuaikan dengan kebtuhan sekolah sebagai mana tentang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolahn (RKAS) dan RAPBS

Bila mana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas Negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah.

Sedangkan penggunaan dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajer BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus di daftar sebagai sumber penerimaan dalam RKAS / RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk acuan rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tata cara dan jenis buku yang harus dibeli dan di uraikan secara detail.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat Hendrotono (2003) bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan bersama orang tua siswa dan masyarakat lainnya, sehingga pihak pemerintah harus lebih memperbanyak bantuan operasional kepada pihak sekolah, sebanding dengan tingginya

penyelenggaraan pembiayaan dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Diperjelas oleh konsep penyelenggaraan dan pemanfaatan BOS bahwa ada tiga alternatif yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan BOS tersebut, yaitu :

1. Pengelolaannya harus transparan dan akuntabilitas, baik kepada warga sekolah, guru, pegawai, siswa dan komite sekolah, dan masyarakat umum lainnya,
2. Adanya system komunikasi dengan orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat dalam hal program pertanggung jawaban keuangan baik melalui laporan tertulis maupun website khusus yang dapat di akses oleh masyarakat luas.
3. Adanya pertanggung jawaban secara keseluruhan program baik kepada pemerintah setempat maupun kepada masyarakat umum.

Dipertegas pula oleh hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa pengalokasian dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam rangka mengembangkan sekolah berdasarkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan dana BOS tersebut dapat meningkatkan fasilitas belajar siswa dan kemampuan mengajar guru.

Dampak BOS terhadap Proses Pembelajaran

Selain ini proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belajar, memerlukan pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan pihak sekolah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa besaran BOS untuk pembiayaan proses pembelajaran tidak mencukupi dalam mewujudkannya, maka pihak sekolah harus mampu mengembangkan secara maksimal sumber pembiayaan lain, sehingga tujuan pelajaran yang hendak dicapai terlaksana dengan baik. Keberadaan BOS tersebut

sangat berarti bagi pihak sekolah dalam meringankan beban pembiayaan yang dialami sekolah dengan segala bentuk pembiayaan yang begitu besar, karena mengingat seluruh barang dan jasa meningkat pembiayaannya dalam mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM) yang berlangsung setiap hari.

Perencanaan pembelajaran merupakan konsep awal dimulainya proses pembelajaran di sekolah yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya sehingga pembiayaan yang diperlukan harus mampu mengakomodirnya, antara lain perangkat PBM, media pembelajaran dan penggunaan metode pembelajaran.

Peruntukan BOS untuk proses pembelajaran di sekolah masih perlu ditingkatkan lagi jumlahnya, karena tidak sebanding dengan banyaknya bentuk pembiayaan yang dilakukan, terutama dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh para kepala sekolah bersama dengan dewan guru dan komite sekolah dalam merumuskan pembiayaan dalam proses pembelajaran antara lain:

1. Adanya Subsidi silang antara BOS dengan Iuran Komite sekolah sehingga seluruh pembiayaan proses pembelajaran dapat terpenuhi adanya, meskipun masih dirasakan kurang oleh guru dalam kegiatan proses belajar mengajar.
2. Mengoptimalkan daya dukung dan kemampuan semua guru dalam berkreasi dan bervariasi dalam membuat alat bantu pengajaran yang disesuaikan dengan materi pelajaran yang di ajarkan, sehingga dapat mengurangi pembiayaan dalam pengelolaan proses pembelajaran tersebut.
3. Menerapkan asas efisiensi dan efektivitas dan semua kegiatan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar (PBM), mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan

proses evaluasi pembelajaran dan peningkatan kinerja guru.

Sejalan dengan itu Syaiful (2003) berpendapat bahwa perencanaan program pengajaran harus memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang ada dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah, kelengkapan dan alat bantu pengajaran, serta daya dukung yang ada, terutama dari pihak orang tua siswa dalam hal pembiayaan proses pembelajaran yang akan direncanakan.

Konsep perencanaan dalam pelibatan seluruh komponen sekolah dapat menimbulkan perasaan ikut memiliki, sehingga dengan sendirinya ada motivasi kepada guru dan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil.

Salah satu aspek yang mengalami perubahan mendasar pada aspek otonomi daerah adalah manajemen pembiayaan sekolah baik dari sisi pendapatan dan pembelajaran maupun dari sisi pertanggung jawabannya. Aspek ini pulalah yang paling rawan dari berbagai penyimpangan sehingga tidak jarang resikonya ditanggung oleh kepala sekolah bahkan kepala dinas setempat.

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam PP 19 tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar, yaitu

1. Biaya motivasi meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pembangunan sumber daya manusia dan modal kerja tetap
2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
3. Biaya personal yang meliputi ; (a). bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b). bahan peralatan pendidikan habis pakai dan (c). biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,

uang lembar transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Sementara itu sekolah dituntut untuk memiliki standar dana pendidikan yang cukup berkelipatan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang bermutu, demikian pula dengan kegiatan pendukung lainnya. Sekolah harus bisa menghimpun dana dari berbagai potensi sumber. Sekolah mengelola dana pendidikan secara transparan, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam mengalokasikan dana pendidikan sekolah berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan.

Dampak BOS Terhadap Pembangunan Fisik Sekolah

Peruntukan BOS terhadap pembangunan fisik sekolah mulai tahun 2007 sampai tahun 2011 pada SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara hanya didominasi pada pengadaan barang dan alat praktek IPA serta perlengkapan sarana buku bacaan pada perpustakaan sekolah, serta pembangunan Fisik lainnya hanya pada bagian pemeliharaan gedung dan sarana lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep awal peruntukan dana Operasional tersebut, pelaksanaannya pada proses pembelajaran dan sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Dana BOS tidak diperuntukan pada pembangunan ruang belajar, ruang guru dan pembangunan sarana lainnya oleh karena berbagai alasan :

1. Jumlah BOS yang jumlahnya tidak terlalu besar sehingga tidak menjangkau untuk membiayai pembangunan fisik sekolah seperti pembangunan ruang belajar, ruang guru dan rehabilitas gedung yang rusak berat meskipun disadari bahwa terkadang BOS tersebut disiapkan sebagian dana untuk membiayai bangunan yang rusak ringan dengan standar pembiayaan dibawah lima juta rupiah

2. Pembangunan fisik sekolah terlalu besar biayanya, sehingga biasanya ada dana khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Peruntukan danan BOS bersifat operasional sekolah yang sebagian besar pada proses pembelajaran di sekolah sehingga penyediaan alat praktek dan pengadaan buku sarana perpustakaan dapat dilakukan karena faktor tersebut adalah penunjang dan pendukung proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan. Walaupun sekolah merasa kekurangan dalam proses pembelajaran karena itu dibutuhkan subsidi silang sumber pembiayaan dari komite sekolah sebagai mediasi dalam penggalan sumber – sumber pembiayaan pendidikan di sekolah baik dari orang tua siswa itu sendiri maupun masyarakat lain yang dapat mendukung proses pendidikan di sekolah tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diutarakan oleh Hsbi (2004) terhadap pembangunan fisik sekolah bahwa masyarakat berpartisipasi dalam bentuk :

1. Berbagai ide pemikiran yang dituangkan dalam rapat RAPS/RKAS sebagai langkah awal perencanaan, melaksanakan prose pembelajaran di sekolah
2. Bentuk materiil seperti sumbangan pembangunan gedung, penambahan bahan dan alat laboratoriu dan sebagainya
3. Bentuk tenaga ikut serta menyumbangkan tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam setiap kegiatan pembangunan fisik sekolah, pengecatan dinding sekolah, tukang kayu, tukang batu dan sebagainya yang dapat dinilai atau dikonversi dengan uang sebagai bentuk partisipasinya bilamana bentuk ekonominya kurang memungkinkan untuk disambungkan ke

pihak sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar anaknya. Diperjelas melalui teori pembiayaan sekolah oleh Mulyasa (2004) bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sekolah harus disesuaikan dengan keuangan sekolah melalui penyusunan RKAS/RABS yang meliputi: sumber pembiayaan dan pengeluaran untu kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan sarana prasarana sekolah, kesejahteraan guru, alat bantu pembelajaran serta faktor pendukung lainnya yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut.

Dampak BOS Terhadap Pelayanan Guru

Dalam meningkatkan pelayanan guru terutama dalam kesejahteraan guru, guru sangat minim dirasakan oleh semua pihak meskipun telah diupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi ini berdasarkan kegiatan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan guru belum maksimal sehingga sebagian besar guru mempunyai jenis pekerjaan lain, untuk menambah kekurangan keuangannya. Salah satu aspek yang ditimbulkan adalah kurang terkonsentrasinya perhatian guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, belum memaksimalkan daya pikiran dan daya nalar serta waktunya untuk semata – mata menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru. Dengan ketidak - mampuannya dana BOS untuk meningkatkan kesejahteraan guru maka pihak sekolah terutama kepala sekolah dan komite sekolah harus mampu mencari solusi dalam pembiayaan pelayanan guru tersebut.

Keberadaan BOS dalam meningkatkan pelayanan guru sangat didukung dan diupayakan dapat ditingkatkan lagi besarnya, karena salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik adalah ditangan guru. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh kepala sekolah

dalam mendesain pembiayaan sedemikian rupa untuk kesejahteraan guru antara lain :

1. Mengikut sertakan para warga sekolah dalam koperasi sekolah baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi konsentif, secara tidak langsung menutupi kebutuhan keluarganya
2. Memberikan berbagai tunjangan kepada guru yang diberi keuangan dalam pengelolaan proses pembelajaran
3. Meningkatkan uang insentif dalam berbagai kepanitiaan baik sumber pembiayaannya dari BOS maupun komite sekolah sehingga wujud kepedulian kepala sekolah terhadap bawahannya
4. Mengajak guru dan pegawai untuk mendesain dan menciptakan alat bantu pengajaran yang secara tidak langsung pihak sekolah akan mengganti pembiayaannya,

Salah satu pengembangan profesionalisme guru adalah peningkatan kesejahteraan. Dikatakan bahwa BOS adalah program terbaik berkenaan dengan reformasi kebijakan publik dengan pembiayaan pendidikan. Sistem pengeluaran dana BOS dianggap dapat memangkas segala birokrasi sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Pemangkasan birokrasi pada penyelamatan dana dari upaya korupsi dan penyelewangan anggaran BOS sebagai salah satu program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat senantiasa di tingkatkan efisiensinya, sebab dengan demikian upaya menggapai salah satu tujuan kehidupan bangsa dan bernegara yang termaksud dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Sejalan dengan itu Purnomo (2001) berpendapat, bahwa guru sebagai salah satu faktor utama dan penentu tinggi rendahnya hasil pendidikan, maka guru harus mempunyai kesiapan dalam proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh tingkat keprofesionalannya dan tingkat kesejahteraannya, sehingga ada sehingga

ada kesungguhan dan keseriusan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengelola BOS secara baik dan benar.

Diperkuat oleh pendapat Hasbi (2004) bahwa berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah, antara lain: pemberian insentif semua guru, pengadaan pakaian dina seragam guru, pelaksanaan belajar tambahan, pelatihan guru, pengadaan bingkisan Natal / Lebaran setiap tahun, yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh pihak sekolah dan jumlah warga tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis deskriptif dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan BOS yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah SMP di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2007 sampai tahun 2011 meliputi besarnya, dana penerimaan, dan pertanggung jawaban BOS tersebut adalah berjalan lancar sesuai yang dikendali oleh semua pihak.
2. Keberadaan BOS terhadap proses pembelajaran, dapat berdampak positif yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bekerja sama dan peningkatan prestasi kerja.
3. Keberadaan BOS terhadap Fisik Sekolah mempunyai dampak positif yang meliputi pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA dan bahasa, pemeliharaan sarana fisik lainnya, dan perlengkapan sumber bacaan pada perpustakaan sekolah.
4. Mempunyai dampak positif keberadaan BOS terhadap pelayanan guru dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kemampuan mengajar yang disesuaikan dengan porsinya masing – masing

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Dearden dan Bead ford. 1984. *Fundamentals of management Accounting*, Homewood Richard Irwin
- Asnawi,S.2002. *Teori Motivasi*. Jakarta Studi Press
- Asramei. 2001. *Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar*. Makalah Makassar ; FIS UNM Makassar.
- Banghart dan Trull. 1973. *Education Planning* New York: The Macmillan company.
- Brady L. 1992. *Curriculum Development*. New York: Penticfall
- Beeby. C. E. 1979. *Assessment Of Indonesian Education. A Guiden In Planning*, terpendam oleh BP3K: Pendidikan di Indonesia, Penilaian Pedoman dan perencanaan. Jakarta LP3ES.
- David. J. 1989 *Synthesis Of research on scholl – badedmanagement Educational Leader-ship*.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen peningkatan mutu berbasis Sekolah buku 1 – 5* Jakarta Depdiknas Direktorat Dikdasmen, Direktorat sekolah lanjutan tingkat pertama.
- Dimmock. C. ed. 1993 *scholl based management and scholl effectiveness*. London and New York, Routletge.
- Depdikbud. 1996. *Pedoman pengelolaan administrasi sekolah* Jakarta Depdikbud RI
- Depdikbud 2002 *kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta: Depdiknas RI
- Kemendiknas. 2010 *manajemen pembiayaan*, Jakarta: Dirjen Manajemen Dikdesmen
- Kasnawi, T. 1996. *Pengantar manajemen sumber daya manusia*. Makassar: UNHAS.
- Kemendiknas. 2010. *Bantuan operasional sekolah* Jakarta: Dirjen manajemen Dikdesmen.
- Lipham, C. 1985. *Educational Management*, Terjemahan Benyamin. Jakarta: Prenhalindo
- Ngalim, P. 1988. *Administrasi dan supervise pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnomo. 2001. *Professional guru*. Jakarta: Depdikbud dan Bina Ashara.
- SMERU, Tim. 2004. *Analisis Penggunaan Dana Bantuan Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Undang – undang RI. 2003. *System Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Wahjo Suminjo. 1984. *Pemimpin dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia.